

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Isu Global (HAM) di Afrika Selatan dan Hong Kong

Febi Fadilah

Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang
febifadilah82@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan hadir karena permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disuatu negara. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk meminimalisir permasalahan isu global HAM yang terjadi di Afrika Selatan dan Hong Kong. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji lebih dalam urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks isu global (HAM) di Afrika Selatan dan Hong Kong baik secara teoritis maupun faktual. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan cara mencari beberapa informasi dari 15 jurnal terindeks nasional yang relevan dan beberapa sumber-sumber lain yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Kemudian dilakukan analisis data agar mendapatkan hasil penelitian yang kritis dan valid. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting jika ditinjau secara historis dan empiris dalam meminimalisir permasalahan HAM yang terjadi di Negara Afrika Selatan dan Hong Kong, dimana masyarakat paham terhadap hak dan kewajibannya sebagai warganegara, memiliki pemahaman kewarganegaraan yang universal dalam menjawab tantangan global, dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, urgensi, isu HAM, Afrika Selatan, Hong Kong

ABSTRACT

Citizenship education exists because the problems that occur in society. The urgency of citizenship education is very important due to global issue of human rights that occur in South Africa and Hong Kong. The purpose of this article is to show how we can see the urgency of citizenship education in the context of global issues (Human Rights) in South Africa and Hong Kong both theoretically and factually. This research uses descriptive qualitative method by seeking some information from 15 national indexed journal, documentation and some other sources that support the research objectives and metaanalysing to get critical and valid research. The results of this study says that citizenship education has an important role viewed by historically and empirically in minimizing human rights issues, society have an erudation of their country and participate in understanding of universal citizenship to face global challenges.

Keywords: citizenship education, urgency, human rights issues, South Africa, Hong Kong



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2018 by the author(s).

Received: March 31 2018

Accepted: July 26 1 2018

PENDAHULUAN

Untuk mendidik warganegara menjadi *Smart and good citizenship* di sebuah negara memerlukan pendidikan kewarganegaraan (Citizenship Education). Warga negara yang baik tergantung kepada *system* kenegaraan atau kaidah yang berlaku di

Negara tersebut (Ananda, 2005), output pendidikan kewarganegaraan bukan hanya menjadikan warganegara yang baik, memahami hak dan kewajiban, tetapi pendidikan kewarganegaraan juga menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan individu agar melek politik dan bisa berpartisipasi dalam sistem politik dan hal itu di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar tercapainya hakikat demokratis.

Latar belakang lahirnya pendidikan kewarganegaraan disebabkan oleh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di sebuah negara, ada beberapa hal yang mempengaruhi lahirnya pendidikan kewarganegaraan antara lain: kondisi geografis, sejarah lahirnya sebuah negara, keberagaman, globalisasi, keadaan politik serta sosial budaya yang ada di sebuah negara (Banks, 2017) dan (Winataputra, 2007), dalam hal ini diskriminasi rasial atau permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu masalah besar yang terdapat di setiap negara yang menjadi salah satu isu global dalam konteks urgensi pendidikan kewarganegaraan di suatu negara, begitu juga yang terjadi di negara Afrika Selatan dan Hong Kong.

Di Afrika Selatan sejarah pendidikan kewarganegaraan bermula saat terjadi kasus HAM terkait strategi-strategi partai politik menjadi dasar terciptanya *apartheid* pada masa jajahan Britania tahun 1948. Apartheid merupakan dominasi minoritas kulit putih dalam ranah politik pemerintahan dan mendiskriminasikan ras kulit hitam dalam catur perpolitikan di Afrika selatan (Staeheli, 2004). Hong Kong merupakan bekas jajahan Inggris selama 1,5 Abad, hal tersebut memberikan dampak terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Hong Kong yaitu tertanamnya nilai-nilai demokrasi liberal model Inggris walaupun pada saat ini Hong Kong berada di wilayah koloni kesatuan yang berdaulat di bawah pemerintah (RRC) yang membentuk suatu sistem One Country, Two Systems pada 1 Juli 1997. Namun dalam perkembangannya permasalahan HAM di Hong Kong mencakup tentang integritas nasional, ketidakadilan serta permasalahan sosial yang terjadi disana sehingga memberikan linikursial dan pijakan terhadap urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pemecahan masalah isu global HAM (Chong, 2015) dan (Lekalake, 2016).

Berdasarkan paparan diatas penulis ingin membandingkan bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di Afrika Selatan dan Hong Kong dalam konteks kasus pelanggaran HAM, dimana ke-dua negara tersebut memiliki latar belakang sejarah yang hampir sama yaitu sama-sama negara bekas jajahan, mengalami permasalahan sosial dan integritas nasional serta terjadinya diskriminasi antar ras/etnis tertentu dan sebagainya. Yang ingin peneliti ketahui lebih dalam yaitu, bagaimana perkembangan pendidikan kewarganegaraan di ke-dua negara tersebut pada saat sekarang ini? Apakah pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu solusi dalam meminimalisir kasus HAM yang terjadi? Dengan harapan pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu solusi dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di Afrika Selatan dan Hong Kong dan menjadikan warganegara yang *smart and good citizenship*.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode *literatur review* dengan pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang berusaha untuk mengambil ide-ide

pokok antar pokok bahasan agar dapat menarik makna dari setiap pokok bahasan, sekaligus melakukan analisis terhadap ide pokok yang ada dalam pokok bahasan tersebut (Maftuhah, 2012). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kumpulan dari 15 jurnal yang terindeks nasional dan internasional yang diakui dalam penambahan referensi akademis, yang menyangkut pokok bahasan yang berisi tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Isu HAM, Pendidikan kewarganegaraan di Afrika Selatan dan juga di Hong Kong. Setelah itu dilakukan Library research (Irham, 2016). Semua pokok bahasan yang terdapat dalam data dianalisis memakai model analisis sistemik, dibandingkan secara sistematis, sehingga didapat suatu hasil perbandingan yang relevan dan valid dengan tujuan penelitian (Niagara, 2012). Berbagai informasi dan data yang berkaitan diinventarisir dan dipahami, kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga cara yaitu induksi Deduksi, dan Komparatif, (Maftuhah, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus HAM di Afrika Selatan dan Hong Kong

Afrika Selatan

Tujuan HAM menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Apartheid merupakan salah satu pelanggaran Hak-hak asasi yang diakui Ensiklopedia Asli yang masuk dalam kategori 10 pelanggaran HAM berat yang diakui di Dunia. Apartheid merupakan dominasi minoritas kulit putih dalam ranah politik pemerintahan dan mendiskriminasi ras kulit hitam dalam catur perpolitikan di Afrika Selatan (Staheli, 2004), selain kasus *apartheid* di Afrika Selatan Pusat Dokumentasi Elsam (lembaga studi & advokasi masyarakat) menyampaikan kasus pelanggaran HAM di Afrika Selatan juga banyak terjadi seperti kebebasan dasar, diskriminasi rasial dan masalah HAM lokal lainnya.

Hong Kong

Hong Kong merupakan bekas jajahan Inggris selama 5 Abad, hal tersebut memberikan dampak terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Hong Kong yaitu tertanamnya nilai-nilai demokrasi liberal model Inggris walaupun pada saat sekarang ini Hong Kong juga dipengaruhi oleh ideologi Cina dan dalam hal ini menimbulkan berbenturnya nilai-nilai yang ada pada masyarakat Hong Kong (Chong, 2015). Pelanggaran HAM yang terjadi di Hong Kong pada umumnya menyangkut permasalahan ketidakadilan, diskriminasi, pengecualian dan ketidaksetaraan sejak akhir 1990an.

Sejarah Lahirnya PKn di Afrika Selatan dan Hong Kong

Afrika Selatan

Nelson Mandela dan *Apartheid* merupakan dua istilah yang melekat di Afrika Selatan. Sampai tahun 1994 negara Afrika Selatan masih didominasi oleh kekuatan kulit putih. Nelson Mandela dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan demokrasi dan persamaan hak, sebagai tokoh inspirasi di Afrika Selatan dan dunia. Dimana Mandela ingin menciptakan kebebasan bagi orang-orang kulit hitam dan membebaskan belenggu sistem *apartheid*. Politik *apartheid* berawal pada masa jajahan britania tahun 1948 yang secara tidak langsung sudah menunjukkan dasar terlihatnya sistem apartheid dari sistem-sistem politik partai pada saat itu dan

dicetuskan pertama kali oleh partai nasional yang mulai berkuasa pada tahun 1984. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Afrika Selatan muncul dengan dilatar belakangi oleh sistem apartheid, yang output sistem pendidikan berdasarkan warna kulit dengan Kementerian yang berbeda dan hal ini telah menghasilkan 14 (empat belas) kementerian pendidikan yang berbeda di negara Afrika Selatan (Stumbras, 2000). Dalam hal ini telah menciptakan iklim dengan disusunnya Undang-Undang persekolahan tahun 1996 oleh pemerintah dan mulai berlaku pada awal 1997 outputnya yaitu, menyiapkan tata administrasi persekolahan yang baru dan memilih dewan sekolah yang baru dan melahirkan pendidikan kewarganegaraan yang terus dikembangkan.

Hong Kong

Pendidikan Kewarganegaraan Hong Kong Pada 1980-2000an sangat bergantung pada perkembangan sosial dan politik dan perkembangan kurikulum. PKn disana sangat dibutuhkan diawali pada tahun 1980 (Leung and Yuen, 2009). Pendidikan kewarganegaraan pertama kali ditawarkan dan diajarkan di sekolah-sekolah pada tahun 1950 (Yani and Pos, 2016), berikut tabel sejarah PKn di Hong Kong:

Tabel 1. Sejarah PKn di Hong Kong

No	Tahun	Nama PKn	Konteks
1	1952	<i>Sosial studies</i>	Geografi dan sejarah (kurikulum sekolah dasar)
2	1965	<i>Economic and public affairs</i> (EPA)	Kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri di SMP
3	1972	<i>Sosial studies</i> dikenalkan kajian <i>government/ pemerintahan</i> di tingkat SMP	Konteks mengarah kepada hubungan antara individu, masyarakat jika diibaratkan sama dengan peran warga negara di tingkat masyarakat lokal dan internasional.
4	1980	Perevisian EPA	Konteks kepada individual and Civil society dan enhancement of political awareness.
5	1984	<i>Sosial studies</i>	Diperluas untuk sekolah menengah atas.
6	1985	GDC meluncurkan GCE	Belajar tentang hak dan tanggung jawab pada tahun 1990an untuk menantang ketidakadilan, diskriminasi, pengecualian dan ketidaksetaraan sejak akhir 1990an.
7	1993	Penerbitan <i>a School Education in Hong Kong</i>	Penekanan pendidikan moral

PKn di Afrika Selatan dan Hong Kong

Afrika Selatan

Managemen Sistem International (MSI) untuk USAID pada tahun 1997-1998 mengaji dampak program pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi terhadap partisipasi politik dan sikap demokratis di kalangan orang dewasa dan

siswa sekolah menengah di Afrika selatan guna mengukur partisipasi individu dalam berpolitik, pengetahuan mereka tentang sistem politik, dan ketaatan mereka terhadap serangkaian norma dan nilai demokrasi seperti; toleransi, kepercayaan, dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi proses politik yang outputnya mengembangkan demokrasi di masa depan (Finkel and Ernst, 2005).

Kurikulum direformasi menjadi kurikulum 2005, pada intinya di tahun pertama anak-anak usia sekolah diberikan banyak dasar-dasar mengenai pemahaman kewarganegaraan dan demokrasi, dalam hal ini Kurikulum 2005 menjadi tempat pijakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang penting di negara Afrika Selatan. Saat sekarang ini Keterlibatan politik pemuda di Afrika Selatan dalam Konteks demonstrasi berargumen Untuk Masa Depan Bangsa membutuhkan relevansi antara Kewarganegaraan, Bangsa, dan Pendidikan di Afrika Selatan (Staeheli, 2004) dan (Lekalake, 2016). Pijakan pendidikan kewarganegaraan di Afrika Selatan ada dua hal yang mendasari yaitu: Mempersiapkan warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan penanaman nilai-nilai yang mendahulukan kesatuan diatas perbedaan.

Kapasitas dan pemahaman yang harus dipelajari oleh masyarakat Afrika Selatan yaitu terkait pemahaman tentang suatu individu, masyarakat, agama, etnik, bangsa dan nilai-nilai yang menumbuhkan jiwa nasionalisme. mengharuskan individu untuk dapat bertoleransi antara yang satu dengan yang lain. Ada 3 (tiga) fase pengajaran PKn di sekolah yaitu:

1. Fase Dasar, memiliki tiga aktivitas kegiatan pembelajaran terkait kemelekan; kemampuan dan keterampilan hidup yang diajarkan selama 3 (tiga) tahun.
2. Fase Lanjutan, berisikan materi PKn sebagai bagian dari seni kebudayaan, Orientasi hidup, dan pendidikan sosial yang diajarkan selama 3 (tiga) tahun.
3. Fase Senior, berisikan tentang kemanusiaan, orientasi hidup, dan ilmu pengetahuan sosial yang merupakan bagian utama bagi pendidikan untuk menjadi masyarakat yang demokratis yang diajarkan kepada kelas 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan), selanjutnya lembaga pendidikan yang terkait menentukan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan kebutuhan.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan PPKn memiliki peranan yang sangat besar agar terbentuknya nilai-nilai yang harus dicapai oleh warganegara Afrika Selatan, yang mana mengharuskan warganegaranya untuk belajar secara individu. Hal ini dikarenakan sistem kurikulum 2005 Afrika Selatan berbasis pada hasil atau lulusan *orientation best education* (OBE). Dengan sistem berbasis pada hasil ini dapat menjadi sumbang pikiran bagi negara Indonesia dalam penerapan pendidikannya, jika kita lihat dari salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia sistem pendidikan berbasis hasil ini menjadi salah satu opsi untuk meminimalisir krisisnya konsep pendidikan di Indonesia terkait meminimalisir kasus degradasi moral terjadi dikalangan remaja pada saat ini. Badan Pusat Statistik tahun 2015 mencatat fenomena kenakalan remaja meningkat sekitar 10.9% tiap tahunnya.

Hong Kong

Di Hong Kong istilah PKn adalah Moral Civic Education (MCE) (Lo, 2009), disorot dalam proposal reformasi kurikuler 2000, dalam penerapannya tenaga

pendidik di Hong Kong belum memahami pemahaman terkait MCE hal ini disebabkan karena kurikulum masih berbasis sekolah dan masih banyak dipengaruhi oleh persepsi guru dalam penerapan pendidikannya. Jika kita lihat Hong Kong pada 1980-2000an PKn di Hong Kong sangat bergantung pada perkembangan sosial dan politik dan dalam hal ini butuh pembaharuan kurikulum (Leung and Yuen, 2009).

Global Citizenship Education (GCE) sebagai bagian dari pedoman kurikulum sekolah menengah di Hong Kong yang telah berjalan selama beberapa dekade. Pedoman kurikulum Hong Kong mulai diajarkan oleh GCE sebagai hasil dari pedoman pendidikan kewarganegaraan terakhir yang dikeluarkan sebelum kembalinya kedaulatan China pada tahun 1997. GCE masuk Pedoman kurikulum resmi Hong Kong telah mengalami perkembangan sejak akhir 1990an antara lain, dari belajar tentang hak dan tanggung jawab untuk menantang ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Karena itulah kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Hong Kong perlu dilakukan pengembangan menanggapi dampak globalisasi yang terjadi saat ini (Chong, 2015).

Dari pemaparan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa lini Kursial sejarah PKn di Hong Kong sangat penting untuk dipahami. Hal ini dapat kita kaji dari proses sejarah PKn Hong Kong yang berbeda, istilah PKn yang berbeda serta model PKn yang berbeda, dimana Pendidikan kewarganegaraan hadir karena permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sebuah negara, yang pada akhirnya pemerintah negara kota Hong Kong menginginkan masyarakatnya memiliki pemahaman terhadap negaranya dan bagaimana cara mereka berpartisipasi dan berbuat dan memiliki pemahaman kewarganegaraan yang universal dalam menjawab tantangan global.

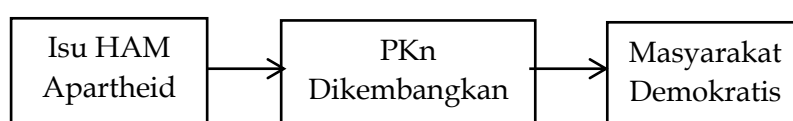
Pengaruh PKn dalam Meminimalisir Permasalahan Ham di Afrika Selatan dan Hong Kong *Afrika Selatan*

Pendidikan Kewarganegaraan di Afrika Selatan berdasarkan Kurikulum 2005, memberikan pengaruh kepada harapan untuk memiliki landasan nilai-nilai pendidikan yang merujuk kepada nasionalisme, melek politik, nilai-nilai sosial, memiliki pemahaman akan hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan intelektual akan kewarganegaraan. *African Union* merupakan salah satu output dari pendidikan kewarganegaraan yang berdampak kepada perlindungan hak-hak asasi yang semakin berkembang di Afrika Selatan, dengan melewati konsensus-konsensus yang panjang sejak awal 1981.

Salah satu faktor lain dari dampak PKn yaitu lahirnya *African Charter* (banjul charter) di Afrika, berlaku pada tahun 1987 dan menjadi landasan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyat Afrika. Piagam ini menjadi instrumen bagi sistem-sistem yang diterapkan oleh negara-negara Afrika dalam menjaga dan melindungi moral dan hal ini berdampak terhadap mulai berakhirnya sistem apartheid di Afrika Selatan.

Di Afrika Selatan pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan dalam meminimalisir HAM dapat kita ketahui dari Persepsi kebebasan politik telah meningkat sejak tahun 2008. Hari Pemuda Afrika Selatan 2016 (16 Juni) menandai

ulang tahun ke 40 pemberontakan Soweto, untuk memprotes pengenalan Afrikaans sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan publik. Demonstrasi menjadi bentuk perang dalam melawan *apartheid* dengan membawa pemuda Afrika Selatan ke garis depan perjuangan pembebasan (South African History Online, 2016). Salah satu contoh faktual dari pembahasan diatas bahwa orang Afrika Selatan telah memiliki keyakinan "kontradiktif" tentang sifat peran kaum muda dalam dunia politik. Pada bulan januari tahun 2016, Menteri Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, Dr. Blade Nzimande bertemu dengan perwakilan mahasiswa untuk mempresentasikan kemajuan menuju delapan tuntutan, termasuk menangani hambatan finansial terhadap pendidikan tinggi, perumahan yang tidak memadai, dan kebijakan bahasa eksklusif (Lekalake, 2016), berikut peta konsep pengaruh PKn dalam konteks isu Ham di Afrika Selatan:



Hong Kong

Di Hong Kong hal yang mempengaruhi Pendidikan kewarganegaraan di sana adalah iklim politik yang berkembang disana. Pengaruh PKn terhadap Hong Kong dalam meminimalisir permasalahan HAM disana yaitu suatu nilai-nilai yang mendidik masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang bermoral, sebelum maupun sesudah penyerahan kedaulatan pada 1997 pada taraf tertentu hampir memiliki persamaan-persamaan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu identik dengan pendidikan moral (Lekalake, 2016).

Pendidikan kewarganegaraan di Hong Kong lebih menekankan kepada pendidikan moral, Pengaruh perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam meminimalisir permasalahan HAM di Hong Kong berupa masyarakat Hong Kong lebih memahami nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, dan keterampilan berpikir kritis terhadap permasalahan nasional dan universal, dalam hal ini nilai-nilai HAM di Hong Kong telah memberikan output kepada masyarakat Hong Kong dalam memahami hak dan kewajiban, menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan individu agar melek politik dan bisa berpartisipasi dalam sistem politik dan hal itu di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Lahirnya pendidikan kewarganegaraan disebabkan oleh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di sebuah negara. HAM menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, di Afrika Selatan dan Hong Kong pelanggaran HAM bukan menjadi hal yang tabu lagi, Apartheid dan ketidakadilan yang terjadi di Afrika Selatan dan Hong Kong menjadi titik tumpu dalam melihat sejauhmana peranan Pendidikan kewarganegaraan untuk meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi. Afrika Selatan dan Hong Kong merupakan suatu contoh perbandingan guna melihat sejauh mana PKn berperan dalam meminimalisir kasus pelanggaran HAM disana baik secara konseptual maupun faktual. Dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai

media baik secara formal maupun informal untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan individu agar melek politik dan bisa berpartisipasi dalam sistem politik dan hal itu di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjawab tantangan global saat ini.

REFERENSI

- Ananda, A. (2005) 'Esensi Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Kilas Balik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia', pp. 37-47.
- Banks, J. A. (2017) 'Failed Citizenship and Transformative Civic Education', *Educational Researcher*, 46(7), pp. 366-377. doi: 10.3102/0013189X17726741.
- Chong, E. K. M. (2015) 'Global citizenship education and Hong Kong's secondary school curriculum guidelines From learning about rights and understanding responsibility to challenging inequality', *Global citizenship education*, 4(2), pp. 1-29.
- Finkel, S. E. and Ernst, H. R. (2005) 'Civic Education in Post-Apartheid South Africa: Alternative Paths to the Development of Political Knowledge and Democratic Values', 26(3), pp. 333-365.
- Irham, M. A. (2016) 'Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Pilkada Lampung', *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(80), pp. 35-56.
- Lekalake, R. (2016) 'Youth political engagement in South Africa: Beyond student protests', *Afrobarometer Dispatch*, 1(101), pp. 1-18. Available at: <http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab-dispatchno101-youth-engagement.pdf>.
- Leung, Y. and Yuen, T. W. (2009) 'School Civic Education Since 1980s: A Brief Review of the Literature in Hong Kong', *Educational Research Journal*, 24(2), pp. 1-36.
- Lo, W. Y. (2009) 'Understanding and Attitudes towards Moral and Civic Education among Primary School Teachers in Hong Kong', *Asian Social Science*, 5(7), pp. 1-15.
- Maftuhah (2012) 'ISLAM DALAM KURIKULUM MADRASAH ALIYAH', *MIQOT*, XXXVI(2), pp. 364-387.
- Niagara, J. I. (2012) 'Jurnal Ilmiah Niagara, Vol. 4 No. 1, Maret 2012', 4(1), pp. 1-12.
- Staheli, L. A. and H. (2004) "'For the Future of the Nation": Citizenship, Nation, and Education in South Africa', *Journal of business ethics*, 44(April), pp. 0-103. doi: 10.1063/1.2756072.
- Stumbras, S. (2000) 'Civic Education in South Africa: the Impact of Adult and School Programs', *Prepared for U.S. Agency for International Development*, (10).
- Winataputra, U. S. (2007) 'PROFIL CIVIC EDUCATION DI HONG KONG M', *Makalah Tugas Akhir*, pp. 1-14.
- Yani, J. A. and Pos, T. (2016) 'The Existence of Civic Education Teacher in the Era of Asian Economic Community', *American International Journal of Social Science*, 5(5), pp. 41-47.